

JSKK (Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan)
Jl. Diponegoro 74 (gedung YLBHI), Jakarta Pusat
e-mail: jskk.indonesia@gmail.com

Aksi damai di depan Istana Presiden tgl. 27 Januari 2011

Kamis ke-195

Nomor: 165/JSKK_Surat Terbuka/I/2011

Jakarta, 27 Januari 2011

Hal : **Klarifikasi Pernyataan Presiden RI**
“Pemerintah Klaim Telah Proses Hukum Pelanggar HAM”

Kepada

Yth. Presiden RI

Bapak Dr. H. Soesilo Bambang Yudhoyono
di-Jakarta

Bapak Presiden yang kami hormati,

Kami yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) sangat prihatin membaca berita di *TEMPO Interaktif* 22 Januari 2011 yang berjudul “Pemerintah Klaim Telah Proses Hukum Pelanggar HAM”. Meminjam pernyataan masyarakat akhir-akhir ini bahwa Bapak Presiden banyak “bohong” ternyata terbukti kebenarannya.

Hari ini adalah Kamis yang ke-195 kami berdiri, diam, berpayung hitam bertuliskan berbagai tragedi pelanggaran HAM, setiap hari Kamis, jam 16.00 – 17.00 di depan Istana Presiden Jl. Medan Merdeka Utara untuk menuntut agar Bapak Presiden segera menuntaskan berbagai tragedi pelanggaran HAM baik yang terjadi pada masa lalu maupun yang terjadi setelah dibentuknya UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM.

Seperti yang telah kami sampaikan kepada Bapak Presiden ketika KontraS membawa kami keluarga korban pada 26 Maret 2008 bahwa alasan Kejaksaan Agung tidak mau menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM tentang tragedy Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II karena terkena azas nebis in idem adalah alasan yang mengada-ada. Memang benar tragedy Trisakti sudah dibawa ke meja Pengadilan Militer sebanyak 2 kali dan Semanggi II sebanyak 1 kali, tetapi untuk tragedy Semanggi I – 13 November '98 belum tersentuh oleh pengadilan apapun. Bapak Presiden pasti tahu bahwa tragedy Penculikan (Penghilangan Orang Secara Paksa 97/98) yang sudah digelar di meja Pengadilan Militer, tetapi DPR RI telah menerbitkan rekomendasi kepada Presiden RI untuk segera menerbitkan Keppres Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc Penghilangan Orang Secara Paksa.

Perlu kami sampaikan bahwa Kejaksaan Agung langsung menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM untuk tragedy Tanjung Priok dan Timor Timur. Oleh karena itu kami mohon agar Bapak Presiden menugaskan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti berkas penyelidikan Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, Mei '98, Talangari Lampung, dan Wasior Wamena. Kami juga mohon agar Bapak Presiden segera menindaklanjuti rekomendasi DPRRI yaitu segera menerbitkan Keppres Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc untuk Penghilangan Orang Secara Paksa.

Demikian surat kami yang ke-165, mohon perhatian Bapak.

PRESIDIUM JSKK,

Suciwati

Sumarsih

Bedjo Untung

Tembusan kepada yth.

1. Bapak Menko Polhukam
2. Bapak Sekretaris Negara
3. Bapak Staf Khusus Bidang Hukum dan HAM
4. Posko Pengaduan di “Maarif Institute”